

Pseudo judicial review dalam perkara perselisihan hasil pemilukada di Mahkamah Konstitusi = Pseudo judicial review in matters of dispute the results of local election in the Constitutional Court / Irfan Nur Rachman

Irfan Nur Rachman, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20403678&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Judicial review adalah kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945 yang merupakan salah satu kewenangan Mahkamah konstitusi. Dalam perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi dapat saja mengesampingkan, membatalkan atau memaknai materi muatan pasal/ayat/bagian dari sebuah undang-undang. Namun dalam perkembangan hukum acara di Mahkamah Konstitusi, ternyata dalam perkara Pemilukada Mahkamah Konstitusi melakukan pseudo judicial review (pengujian undang-undang semu) di mana Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap materi muatan/pasal/ayat atau bagian dari suatu undang-undang. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis konstruksi judicial review dalam pengujian undang-undang dibandingkan dengan konstruksi pseudo judicial review dalam perkara perselisihan hasil Pemilukada. Selain itu juga bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kekuatan hukum mengikat suatu materi muatan pasal/ayat yang telah diuji dalam perkara Pemilukada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formil, permohonan judicial review dalam perkara pengujian undang-undang dan permohonan pseudo judicial review dalam perkara perselisihan hasil Pemilukada adalah berbeda karena diatur oleh dua jenis hukum acara dalam kewenangan yang berbeda. Akan tetapi dalam konteks putusan, konstruksi judicial review dan konstruksi pseudo judicial review memiliki persamaan dan perbedaan. Di sisi lain, materi muatan pasal/ayat/bagian dari undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pemilukada masih memiliki kekuatan hukum mengikat karena Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan norma dalam undang-undang yang diuji. Akhirnya, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah perlu diberi kewenangan menguji Pseudo judicial..., Irfan Nur Rachman, FH UI, 2015

vii

secara terbatas saat melaksanakan tugas dan kewenangan selain pengujian undang-undang dan hal ini perlu diatur dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi.

<hr>

ABSTRACT

Judicial review is the test act against UUD 1945- that is one authority the constitutional court. In testing legislation, affairs--how the constitutional court ruled out, could have cancel or material handling charge article / ayat / part of a statute. But in the legal developments event at the constitutional court, turned in regional head affairs--how the constitutional court to review (pseudo judicial testing legislation specious) where the constitutional court to do our tests material charge / article ayat / or part of a statute. The purpose of this thesis was to review and analyze the contruction of judicial review in testing legislation compared with the contruction of

pseudo judicial review in the matter of dispute the results of regional head. It also aims to review and analyse legal force fasten a material charge article / verse that has been tested in matters of regional head.

The research results show that on formil, judicial review the request in the matter of the act of testing and supplication pseudo judicial review in the matter of the results of the upcoming general election strife is different because be set by two types of laws the event under the authority of the different. However in the context of the award, construction judicial review and construction pseudo judicial review having similarities and differences. At the other side a Pseudo judicial..., Irfan Nur Rachman, FH UI, 2015

viii

charge of article material / paragraph / part of legislation that has been tested by the constitutional court in the matter of the upcoming general election still having legal force binding because the constitutional court did not make the norm in a law that tested. Finally, as judicial constitution, the court need to be given the authority test in a restrictive manner while carrying out the tasks and the authority in addition to testing the laws and this needs to be regulated in law the event of the constitutional court.